

Tantangan Eastern Partnership Uni Eropa Terkait Krisis Ukraina Tahun 2013- 2016

Wayan Adhi Mahardhika¹
Puti Parameswari²

Abstract

This study discusses the determine of EU Eastern Partnership on Challenge Related to the Ukraine Crisis. The approach of this study uses qualitative approach and descriptive analysis as the method. In this study, the author describes EU Eastern Partnership integration on challenge related to the Ukraine Crisis which is impact to instability of region that affect to integration process between EU and Eastern Europe countries that are incorporated in Eastern Partnership. The Ukraine crisis has implications for economic problems in Eastern Europe, and rise of separatism in some region of Eastern European countries that has cause political and security problems, and the existence of external pressure from Rusia to suppress the influence of the EU In the region that worsen the situation in Eastern Europe. This is become a challenge for Eastern Partnership Integration because the condition of regional integration needs economic, political and security stability that is a key requirement of Regionalism.

Keywords: EU, eastern partnership, Ukraine crisis, regional integration

Pendahuluan

Uni Eropa Merupakan organisasi antar-pemerintahan dan Supranasional yang anggotanya terdiri dari 28 negara di Eropa, terbentuk pada tahun 1957 dengan nama awalnya adalah *European Economic Community* (EU Institutions, 2017). Yang dimaksud dengan Supranasional adalah suatu sistem dimana pemerintahan nasional memberikan sebagian kedaulatan nya kepada suatu badan organisasi internasional. Tujuan utama terbentuknya Uni Eropa adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi, dan sosial. Untuk mencapai tujuan utamanya, Uni Eropa membutuhkan integrasi dari Negara-negara di Eropa agar hal tersebut dapat terwujud. Untuk mengintegrasikan Negara di Eropa, Uni Eropa menawarkan integrasi kepada negara-negara di luar Uni Eropa dengan keuntungan *free trade* ke

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur, wayanadhi96@gmail.com

² Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur

Negara-negara Uni Eropa (EU Institutions, 2017). Untuk mewujudkan integrasi dengan negara lain pada tahun 2004 Uni Eropa mengeluarkan *European Neighbourhood Policy* yang menargetkan kerjasama mendalam dengan Eropa Selatan dan Eropa Timur.

Kebijakan ENP bertujuan untuk memperluas wilayah kerja Uni Eropa agar terjalin kerja sama yang lebih mendalam dengan maksud untuk berintegrasi dengan Uni Eropa. ENP ini telah membawa pengaruh Uni Eropa menjadi jauh lebih besar, 16 negara telah menjadi mitra Uni Eropa dalam kebijakan ENP. Selain integrasi yang lebih mendalam, Kebijakan ENP ini akan membuat Uni Eropa memiliki pengaruh yang besar dan menguntungkan secara geopolitik sehingga proses integrasi ENP terus dilakukan sampai sekarang terutama di bagian Eropa Timur. Tetapi yang perlu diperhatikan kerjasama ENP ini memiliki persyaratan yang harus dimiliki seperti kestabilan politik dan ekonomi terdahulu agar implementasinya dapat berjalan. Sehingga Uni Eropa juga membantu dalam menstabilkan keadaan ekonomi dan politik negara yang ingin bergabung agar dapat memenuhi kriteria untuk Implementasi ENP.

Dalam kebijakan ENP ini, Eropa Timur sendiri memiliki program khususnya yaitu kebijakan *Eastern Partnership* (EaP) yang menargetkan Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, dan Ukraina. Kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan *good governance* di Eropa Timur. Bagi Eropa Timur sendiri bergabung dengan Uni Eropa merupakan keuntungan bagi mereka, dikarenakan dengan bergabungnya ke Uni Eropa akan membuka perluasan perkembangan ekonomi di Eropa Timur. Sehingga masyarakat Eropa Timur banyak yang menuntut ke pemerintahan mereka untuk bergabung ke Uni Eropa. Selain itu dengan adanya keanggotaan di Eropa Timur akan memperkuat kekuatan politik dan geopolitik Uni Eropa di Eropa (Nuroglu, 2012: 53). Disamping keuntungan-keuntungan integrasi yang di dapat, perlu diketahui bahwa proses integrasi kebijakan EaP Uni Eropa ini sendiri tidaklah mudah, ada berbagai faktor yang menghambat kebijakan EaP tersebut seperti standar ekonomi, kestabilan politik dan sosial. Salah satu hambatan besar dari integrasi EaP ini adalah faktor eksternal yang berasal Rusia yang tidak menginginkan adanya pengaruh Uni Eropa di regional Eropa Timur, karena menurut Rusia kebijakan EaP Uni Eropa akan membuat pengaruh Rusia di Eropa Timur akan berkurang sehingga kekuatan Rusia akan melemah jika kebijakan EaP terus berjalan (EUCE, 2008: 2).

Rusia masih menginginkan Eropa Timur untuk kepentingan regional Rusia dan masih ingin tetap Eropa Timur berada di bawah pengaruh mereka. Hal ini di buktikan dengan Rusia mengintervensi negara-negara Eropa Timur khususnya bekas uni soviet yang mencoba berintegrasi dengan Eropa Timur (Trenin, 2014: 5). Salah satu Negara yang diintervensi adalah Ukraina. Hal tersebut dimulai pada saat Ukraina mencoba untuk bekerjasama dengan Uni Eropa yang dituntut oleh masyarakat Ukraina kepada pemerintahan rezim Viktor Yanukovych. Akan tetapi pada November 2013, president Viktor Yanukovich menghentikan perjanjian tersebut dan cenderung ingin mendekat ke regionalisasi Rusia yaitu *Eurasian Economic Union* sehingga membuat marah masyarakat Ukraina dan dimulainya krisis Ukraina (Ramicone, 2014: 4). Masyarakat menuntut turunnya presiden Viktor Yakunovych dan pada februari 2014 president Viktor Yanukovych lengser dari kepemimpinan Ukraina. akhirnya pada tanggal 22 Februari 2014 Melihat kuatnya pengaruh barat di Ukraina tersebut Rusia langsung melakukan intervensi di krimea agar menghambat proses integrasi dengan Uni Eropa (Mearsheimer, 2014), setelah kejadian itu negara-negara yang bergabung dengan EaP terutama yang menandatangani perjanjian Perdangangan seperti Moldova dan Georgia juga mengalami dampak dari krisis Ukraina. Munculnya semangat separatis setelah referendum

krimea membuat ancaman yang serupa mengancam negara-negara yang mengikuti EaP. Rusia menggunakan separatisme dan pengaruhnya yang lama untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur tepatnya untuk wilayah Balkan dan laut hitam. Rusia juga telah berencana untuk membuat suatu organisasi supranasional seperti Uni Eropa yang bernama *Eurasian Economic Union* yang beranggota Negara-negara di bagian Eropa Timur dan Asia Tengah (Internasional Crisis Group, 2016). Hal ini juga menjadi alasan utama mengapa Rusia dengan agresif mengintervensi negara-negara yang tergabung dalam EaP dan menekan pengaruh Uni Eropa agar mau bergabung dengan Eurasian Economic Union

Dengan intervensi yang dilakukan Rusia di Ukraina menunjukkan bahwa Rusia menanggapi serius dengan adanya kehadiran *Eastern Partnership* Uni Eropa tersebut. Karena memang kepentingan antara keduanya saling berbenturan di regional Eropa Timur. Hal ini menjadi tantangan bagi kebijakan *Eastern Partnership* Uni Eropa, Kehadiran Rusia yang terus masih ada di Eropa Timur membuat proses integrasi menjadi sulit. Pengaruh kekuatan Rusia juga masih kuat di negara-negara EaP, sehingga negara-negara ini masih bergantung dengan Rusia. Krisis Ukraina menjadi kemunduran bagi Negara EaP bahwa berintegrasi dengan Uni Eropa, Dari hal tersebut memunculkan dilemma di Negara yang bergabung dalam EaP untuk bergabung dengan Uni Eropa karena takut dengan ancaman yang akan terjadi sama seperti krisis Ukraina (Merry, 2015). Sehingga krisis Ukraina merupakan pertanda bahwa Rusia akan siap terus untuk mempertahankan pengaruhnya dan akan menekan Eastern Partnership Uni Eropa yang mengganggu pengaruh Rusia di Eropa Timur.

Eastern Partnership merupakan sebuah model regionalisme ekonomi yang diinisiasi Uni Eropa untuk berintegrasi dengan Belarus, Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaijan dan Ukraina dengan Tujuan utamanya untuk integrasi yang lebih mendalam dengan Uni Eropa. Hal ini disambut baik negara-negara tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari integrasi tersebut. Walaupun mendapat respon yang baik dalam prosesnya, integrasi antara Uni Eropa dan keenam negara mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang paling mempengaruhi terhambat nya proses integrasi adalah krisis Ukraina. Krisis Ukraina ini berdampak pada referendum Krimea yang memunculkan semangat separatisme seperti yang terjadi di Moldova, Ukraina timur dan Georgia yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan kawasan dan lemahnya pengaruh politik uni eropa yang berpengaruh terhadap integrasi EaP. Selain itu dampak lain krisis ini terjadi penurunan kegiatan ekonomi di Eropa Timur yang menyebabkan proses implementasi EaP menjadi terhambat. Pemaparan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana tantangan Eastern Partnership terkait krisis Ukraina Tahun 2013-2016?

Pembahasan

Konferensi Vilnius yang membahas mengenai *Eastern Partnership* diselenggarakan pada bulan November 2013, memiliki tujuan yang disebutkan sebelumnya pada pertemuan puncak di Warsawa mengenai "membangun wilayah bersama mengenai demokrasi bersama, kemakmuran, stabilitas dan peningkatan interaksi." Uni Eropa dan keenam negara tersebut setuju bahwa penyelesaian damai konflik melalui membangun kepercayaan dan hubungan baik sangat penting bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan kerjasama di wilayah Eropa Timur. Akan tetapi sejak terjadinya krisis Ukraina, *Eastern Partnership* mengalami kemunduran integrasi uni eropa dan negara-negara EaP. Banyak masalah politik dan ekonomi yang merambat di Eropa Timur, serta pergerakan separatist yang menghambat proses integrasi regional. Munculnya masalah separatisme di Eropa Timur yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan, ditambah dengan masalah politik yang disebabkan

oleh elit-elit pro Rusia dan Pro Barat , serta masalah penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan krisis ukraina, menyebabkan negara-negara Eropa Timur khususnya keenam negara EaP mengalami kerugian atas krisis tersebut Dilihat dari hal tersebut Eastern Partnership merupakan sebuah harapan bagi negara-negara Eropa Timur khususnya 6 negara yang tergabung dalam kebijakan EaP untuk memperbaiki keadaan di negara mereka, namun karena krisis Ukraina kebijakan ini mengalami kendala karena terciptanya ketidakstabilan kawasan yang menciptakan ketidakmampuan untuk berintegrasi dengan uni eropa.

- *Analisis Tantangan Kebijakan Eastern Partnership*

Kebijakan *Eastern Partnership* merupakan salah satu bentuk upaya regionalisasi uni eropa terhadap keenam negara yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova dan Ukraina. Dalam regionalisme menurut Coulumbis dan Wolfe disebutkan bahwa ada empat cara atau kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan yaitu kriteria politik/militer, kriteria geografis, kriteria ekonomi, dan kriteria transaksional (Koller, 2013: 139). Dalam kasus ini EaP bisa dilihat bahwa EaP merupakan regionalisasi berdasarkan atas kriteria ekonomi dan transaksional. Sehingga dapat diklasifikasikan Kebijakan EaP ini bertujuan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan perdagangan. Hal tersebut diwujudkan EaP dengan *Association Agreement (AA) and Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA)*. Selain ekonomi EaP juga merupakan sebuah kerjasama yang bertujuan untuk mereformasi perpolitikan di Eropa Timur yang cenderung korup dan tidak transparan, akan tetapi hal ini tidak merujuk pada kriteria politik, karena kriteria politik menurut Coulumbis dan Wolfe adalah kesamaan ideology dan aliansi, sehingga dapat disimpulkan reformasi politik merujuk pada proses integrasi regional.

Ketika EaP ini bisa di klarifikasikan sebagai bentuk regionalisme ekonomi atau perdagangan , maka akan mudah untuk menganalisa tantangan EaP terkait krisis Ukraina. Tujuan dari integrasi EaP ini sesuai apa dengan dikatakan W. S. Jones yang menyebutkan tujuan-tujuan itu antara lain: (1) maksimalisasi potensi ekonomi; (2) maksimalisasi potensi politik; dan (3) penyelesaian konflik regional (Jones 1993: 442). Untuk mengetahui tantangan regionalisme uni eropa dengan EaP maka yang perlu di perhatikan adalah bagaimana mengukur derajat suatu proses integrasi tersebut, memecah prose integrasi menjadi sedikitnya empat dimensi: ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Untuk mempermudah maka pertimbangan faktor eksternal juga mempengaruhi proses integrasi.

Paska krisis ukraina Tantangan integrasi regional EaP memiliki masalah yang cukup kompleks baik secara internal maupun eksternal. Dari permasalahan eksternal seperti diketahui bahwa ada tekanan dari luar untuk memperhambat proses integrasi, tekanan dari luar ini berasal dari ambisi Rusia yang ingin menguasai Eropa Timur. sedangkan dari tantangan internal nya, paska krisis Ukraina banyak negara-negara EaP mengalami pergolakan politik seperti separatis, korupsi, dan lemahnya otoritas pemerintah setempat, selain itu ekonomi di kawasan Eropa Timur mengalami kemunduran dan banyak negara-negara EaP belum bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi sejak krisis ukraina. Untuk melihat hal tersebut maka akan dijelaskan secara detail tantangan internal dan eksternal tersebut kemudian melihat tantangan regionalisme dan proses integrasi regional EaP secara keseluruhan.

- *Tantangan Eksternal; Intervensi Rusia*

Tantangan ini berasal dari ambisi Rusia yang ingin mengembalikan kekuasaannya seperti pada jaman soviet yang terdahulu sehingga adanya kehadiran Uni Eropa menurut Rusia merupakan sebuah penghalang bagi kepentingan regional Rusia. Maka dari itu ada beberapa tekanan yang diberikan Rusia untuk mencegah integrasi EaP di Eropa Timur.

Tantangan eksternal dari kebijakan EaP yang lainnya adalah intervensi dan tekanan dari Rusia itu sendiri. Regionalisme Uni Eropa ini memiliki resiko yang tinggi, karena diawasi oleh Rusia. Contoh pada tahun 2008 yang menimpa Georgia ketika ingin melaksanakan kerjasama regional dengan Uni Eropa dan diinvasi oleh Rusia. Sekarang hal ini sekarang menimpa Ukraina yang terjadi saat lengser nya Yakunovchy, Rusia memberi tekanan dan intervensi ke Ukraina untuk menekan negara-negara EaP agar tidak lepas dari Rusia. Tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara EaP lainnya akan mendapatkan perlakuan yang sama dari Ukraina jika menyetujui regionalisasi uni eropa. Tetapi perlu di garis bawahi tekanan militer dan politik Ukraina masih tidak terlalu mempengaruhi regionalisasi EaP, Ukraina dan Georgia masih melakukan hubungan dengan Uni Eropa. Walaupun tekanan Ukraina masih berpengaruh sedikit terhadap EaP, akan tetapi jika EaP terus berjalan maka eskalasi tekanan Ukraina akan terus meningkat, mengingat bahwa Ukraina juga melakukan regionalisasi EEU di Eropa Timur dan invasi ukraina. Sehingga tantangan EaP adalah menjaga keberlanjutannya, jika ketidakstabilan meningkat maka kemungkinan EaP bisa menjadi kegagalan, dan negara mitra EaP lebih memilih regionalisasi Rusia. Melihat hal tersebut Uni Eropa harus menciptakan proyeksi kebijakan keamanan untuk Eropa Timur agar EaP dapat berjalan dengan baik.

- *Tantangan Internal: Konflik, Politik, dan Ekonomi*

Dari tantangan eksternal tersebut muncul tantangan internal yang mengganggu proses integrasi regional antara UE dan keenam negara EaP. Krisis Ukraina merupakan krisis yang tidak hanya berimplikasi terhadap Ukraina saja, namun negara kawasan Eropa Timur, khususnya Negara-Negara EaP mengalami efek dari krisis Ukraina tersebut. Dalam integrasi regional perlu adanya potensi ekonomi, dan politik serta kebebasan konflik agar integrasi yang lebih mendalam dapat terjadi. Namun sejak krisis Ukraina terjadi banyak masalah seperti munculnya semangat pergerakan separatis yang membuat ketidakstabilan politik, serta terpuruk nya ekonomi Eropa Timur.

1. *Konflik dan Separatisme*

Gerakan separatis di wilayah lingkungan kebijakan EaP menjadi salah satu hambatan utama bagi kerja sama EU-EaP. Dengan adanya konflik di Ukraina dan separatism yang ada di krimea dan di tambah lagi di daerah Donbass Ukraina menunjukkan taktik Rusia untuk memperlambat proses regionalisasi. Taktik Rusia ini dibuktikan dengan konflik Ukraina di wilayah Donestsk dan Luhansk yang di prakarsai oleh pendukung, dan angkatan militer dari Rusia (Strobel, 2014: 1). Tindakan intervensi Ukraina ini telah mengubah paradigma keamanan di Eropa Timur yang membuat proses integrasi dari kebijakan EaP menjadi terhambat karena kekhawatiran keamanan. Selain itu semangat separatisme muncul setelah Krimea berhasil dalam referendum nya, dan menginginkan pengaruh barat keluar dari kawasan Eropa Timur. Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya untuk membangun kembali pemerintahan di Eropa Timur dan menurunkan perekonomian regional Eropa Timur, sehingga ini akan berdampak untuk implementasi EaP.

Pendudukan Krimea ini mengingatkan kembali dengan apa yang terjadi enam tahun sebelumnya. Di Georgia, ketika Vladimir Putin memanfaatkan konflik local untuk

membangun kehadiran militer yang kuat di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Menurut laporan Misi Pencarian Fakta Independen Uni Eropa tentang konflik di Georgia, Rusia memasukan sukarelawan / tentara bayaran ke Ossetia Selatan pada awal Agustus 2008 (sebelum Rusia secara resmi memutuskan untuk melakukan intervensi), tentara tersebut berperan dalam eskalasi konflik di Georgia (European Council, 2009: 10).

Mengikuti pola yang sama, Rusia juga merupakan penyokong aksi separatistis di Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur. Sehingga berintegrasi dengan Eropa merupakan sebuah perlawanan bagi Rusia.. Tantangan yang serupa lainnya adalah Moldova dalam Referendum di wilayah Gagauz Pada bulan Februari 2014, Gagauzia, sebuah wilayah otonom di selatan negara Moldova, yang mengadakan referendum inkonstitusional dimana mayoritas pemilih menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan *Eurasian Economic Union* (Ursu, 2014). Referendum ini memang belum mempengaruhi keputusan Moldova dalam regionalisme nya dengan Uni Eropa, akan tetapi mengingat pola Ukraina yang menggunakan separatisme, referendum ini bisa digunakan Rusia untuk menekan regionalisasi Uni Eropa di Moldova.

Hal terpenting berikutnya adalah daerah Transnistria, wilayah ini adalah entitas politik yang ingin memisahkan diri dari Moldova. Transnistria terletak di antara Moldova dan timur Ukraina wilayah ini tidak lain adalah wilayah satelit dari Ukraina sendiri. sekitar 1,200 militer Ukraina berada di wilayah negara tersebut, dan di negara ini menyimpan gudang persenjataan Ukraina pada jaman era soviet. Sehingga daerah ini merupakan daerah strategis untuk melancarkan pola separatistis nya di negara Moldova dan Ukraina (Rojansky, 2011: 4). Sehingga negara ini bisa dibilang sebagai proxy Rusia di Eropa Timur untuk tetap mempertahankan pengaruhnya.

Yang terakhir adalah Armenia, Rusia mengandalkan konflik Nagorno-Karabakh untuk membuat Armenia berada di bawah pengaruh Ukraina. Armenia berharap Ukraina menjadi pihak yang membantu Ukraina untuk memenangkan Armenia dalam konflik territorial tersebut. Akan tetapi dari Rusia sendiri hal ini menjadi tantangan tersendiri karena jika Rusia membantu Armenia maka aliansi dengan Azerbaijan akan memburuk sedangkan dalam proyeksi EEU Azerbaijan merupakan salah satu mitra strategis. Di lain sisi Uni Eropa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan hubungannya dengan Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh (Klever, 2013: 16). Tetapi hal negatif dari kesempatan tersebut adalah Rusia akan memilih membantu Azerbaijan dan akan terjadi peningkatan konflik yang tidak diinginkan oleh Armenia. Sehingga hal ini menjadi dilema baik Uni Eropa, Armenia, dan Rusia itu sendiri.

2. Ketidakstabilan Politik dan Korupsi

Melihat faktor-faktor politik, ekonomi dan keamanan, terlihat jelas bahwa tingkat perkembangan demokrasi di lingkungan Eropa Timur telah menjadi prasyarat penting untuk melaksanakan regionalisasi dan perkembangan positif mengenai peningkatan kerjasama dan integrasi. Tetapi Sebaliknya, tingkat korupsi yang tinggi masih terjadi di negara-negara mitra EaP. Korupsi sudah menjadi seperti kebudayaan di negara- negara Eropa Timur, dan korupsi ini masih terus berlanjut dan menjadi tantangan utama dalam regionalisasi dengan Uni Eropa (Lukic, 2016: 7). Keputusan dan kebijakan politik yang bersifat tertutup dan cenderung lebih menguntungkan kepentingan elit dan kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kecenderungan sistem parlemen yang berkubu antara partai sosialis dan demokrasi yang menyebabkan tertutupnya dan saling tidak setuju dalam pengambilan kebijakan di parlemen. Selain itu budaya politik oligarki membuat hanya beberapa elit

tertentu yang menentukan arah pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Di Ukraina sendiri, korupsi sudah menjadi tradisi dari negara lamanya yaitu Uni Soviet, dan pembentukan pemerintahan oligarki yang sama seperti Uni Soviet masih diwarisi sebagian negara Eropa Timur. maka dari itu banyak masyarakat yang menuntut perubahan di wilayah Eropa Timur. hal ini juga menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Eropa Timur memilih untuk berintegrasi dengan Uni Eropa karena kebijakan EaP mempromosikan demokratisasi pemerintahan.

Setelah krisis Ukraina terjadi banyak reformasi di Eropa Timur ke pemerintah yang lebih demokratis, dan biasanya di prakarsai oleh Uni Eropa. Walaupun rezim berganti budaya korupsi tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Masih banyak pendukung rezim terdahulu di kalangan pemerintah yang sekarang. Sehingga korupsi masih merajalela sampai sekarang di Eropa Timur. Korupsi tidak hanya alat untuk memperkaya partai yang berkuasa dan pemerintahan yang berkuasa namun juga mengancam partai, dan rezim yang berhaluan demokrasi yang mendukung EaP. Biasanya sering terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan rezim semi demokrasi. Hal ini menjadi ancaman bagi EaP itu sendiri karena dengan adanya korupsi di kalangan pemerintahan semi demokratik maka pemerintahan pro Rusia akan mendapatkan kepercayaan lagi. Di Ukraina, Moldova, Belarus, dan Azerbaijan sendiri mengalami masalah melawan korupsi di rezim mereka sendiri. kebanyakan korupsi berada pada anggota parlemen mereka sendiri, dan BUMN. Korupsi ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas pemerintah. Jika elektabilitas kurang maka pemerintahan semi demokratis yang pro barat ini akan hilang kepercayaannya. Selain itu korupsi merupakan indeks untuk menunjukkan tingkat transparansi dan demokrasi di sebuah negara, negara-negara uni eropa sendiri memiliki standar yang tinggi mengenai tingkat demokrasi dan transparansi. Jika Negara EaP masih terjebak dalam korupsi tidak dipungkiri bahwa kebijakan EaP ini bisa tidak berhasil di implementasi kan karena ada ketidakpercayaan negara-negara uni eropa untuk membantu negara mitra EaP.

3. Ekonomi dan Energi

Ketergantungan ekonomi dan energi terhadap Rusia merupakan sebuah tantangan bagi kebijakan EaP. Pasca krisis Ukraina, Rusia memainkan perang ekonomi dengan adanya larangan export, dan visa kerja ke Rusia terhadap negara-negara Eropa Timur yang pro ke Uni eropa. Hal ini membuat Ukraina dan Moldova mengalami masalah suplai energy dan migrasi kerja ke Ukraina yang menurun. Hal ini juga di rasakan Armenia sendiri yang menyebabkan sekarang Armenia lebih memilih ke EEU. Sedangkan Moldova sendiri walaupun menentang tindakan Rusia di Ukraina, akan tetapi Moldova juga bergantung pada suplai militer dan ekonomi dari Rusia (Roaf, 2014: 55). Karena ketergantungan ekonomi tersebut, Armenia lebih memilih bergabung dengan EEU milik rusia pada tahun 2014. Melihat tindakan Armenia yang tiba-tiba berpaling dari uni eropa merupakan signal bagi EaP sendiri bahwa kebijakan ini perlu di dorong lebih keras agar integrasi berhasil. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa krisis Ukraina telah membawa sebuah kenyataan bahwa Negara-negara Eropa Timur khususnya bekas Uni Soviet ingin bekerjasama dengan Uni Eropa dengan harapan ekonomi dan reformasi politik akan tetapi di lain sisi ketergantungan dengan Rusia tidak bisa dihilangkan.

Salah satu contoh lainnya adalah Belarus yang sudah menyetujui perjanjian kerjasama dengan Rusia pada tanggal 29 mei 2014 (Delcour, 2015: 8). Belarus juga merupakan negara yang masih bergantung ekonomi dan energi pada Rusia, namun Belarus sendiri masih merasa khawatir dengan integrasi lebih mendalam dengan Rusia, president

Alexander Lukashenka sendiri mengkuatirkan integrasi dengan Ukraina akan mengancam kedaulatan Belarus sendiri. seperti yang di ketahui bahwa EEU ini diinisiasi oleh Rusia, dan integrasi ini bisa dikatakan merupakan ambisi Rusia untuk menguasai Eropa Timur, sehingga EEU ini merupakan bentuk hegemoni regional Rusia, dan hal ini yang dikhawatirkan Belarus. Dari hal tersebut terlihat bahwa negara mitra EaP sendiri masih sangat bergantung energy pada Rusia. EaP sendiri dalam hal kebijakan energi bersifat jangka panjang dan membutuhkan pembangunan yang lama, sedangkan kebijakan EEU menawarkan kebijakan jangka pendek yang lebih gampang di jalankan. Maka dai itu EaP harus bisa merespon mengenai krisis energi yang terjadi pada negara-negara EaP agar tidak berpaling dari EaP itu sendiri seperti yang terjadi pada Armenia dan Belarus.

Selain ketergantungan negara—negara Eropa Timur, setelah adanya krisis Ukraina menciptakan sebuah instabilitas ekonomi yang baru. Seperti yang di ketahui setelah referendum Ukraina, Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Hal ini menyebabkan nilai mata uang Rusia menurun sehingga Rusia menarik sahamnya di luar Rusia untuk menyelamatkan asetnya agar tidak bangkrut. Hal ini juga terjadi di Eropa Timur, banyak asset Rusia yang di tarik sehingga membuat turunnya ekonomi Eropa Timur dan naiknya tingkat pengangguran (Starr, 2014: 49).

Selain ketergantungan dan penurunan ekonomi di Eropa Timur, kebijakan EaP ini memilki standar tinggi untuk berintegrasi dengan uni eropa, barang export untuk ke uni eropa sendiri itu memilki standar yang belum bisa dicapai negara –negara mitra EaP, ditambah lagi dengan setelah krisis iklim perekonomian di Eropa Timur menurun, sehingga kebijakan EaP dalam jangka pendek belum bisa diimplementasikan (MIcco, 2015: 30). Selain itu intensitas Perdagangan menurun di Eropa Timur, karena laut hitam masih belum stabil sehingga aktivitas ekonomi menurun di wilayah Balkan dan sekitarnya.

- *Respon Terhadap kebijakan Eastern Partnership Terkait Krisis Ukraina*

Dari tantangan tersebut dapat dilihat bahwa respon keenam negara yang tergabung dalam EaP memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kebijakan *Eastern Partnership*. Pada umumnya semua negara menerima baik kebijakan ini, namun pada prosesnya dan setelah krisis Ukraina keenam negara ini memiliki respon yang berbeda-beda. Beberapa negara seperti Ukraina, Moldova dan Georgia walaupun terjadinya krisis Ukraina yang paling mempengaruhi ketiga negara ini, mereka menerima baik dan mendukung kebijakan Eastern Partnership walaupun pada prosesnya mengalami berbagai tantangan internal dan eksternal dari Rusia. Ukraina, Moldova, dan Georgia menunjukkan keseriusan mereka dengan menyetujui *Association agreements and DCFTA* dengan Uni Eropa yang dimana mengantarkan ketiga negara berintegrasi lebih lanjut dengan Uni Eropa (Mikhnovets, 2015: 4). Menurut mereka berintegrasi dengan Uni Eropa merupakan kunci strategis dalam mengembangkan ekonomi dan politik yang lebih baik sehingga dapat dikatakan Ukraina, Moldova, dan Georgia merupakan pihak yang paling mendukung Eastern Partnership.

Di lain sisi walaupun awalnya Belarus dan Armenia menrima baik kebijakan *Eastern Partnership* pada prosesnya kedua negara ini berpaling dari *Eastern Partnership* untuk menghindari masalah domestik kedua negara dan tekanan dari Rusia. Selain itu alasan utama Armenia dan Azerbaijan adalah ketergantungan Ekonomi terhadap Rusia di bidang energi dan perdagangan sehingga menyebabkan kedua negara ini berpaling dari kebijaka EaP (Mercouris, 2015). terlihat bahwa Belarus dan Armenia dapat dikatakan pada awalnya merupakan pihak yang mendukung akan tetapi krisis Ukraina menyebabkan kedua negara ini mengurungkan niat mereka untuk berintegrasi karena krisis ukraina tersebut sehingga

dapat dikatakan mereka pihak kontra dengan kebijakan ini karena situasi yang terjadi. Azerbaijan merupakan satu satunya negara yang tidak terlalu terlibat dalam Eastern Partnership dan cenderung netral diantara Uni Eropa dan Rusia. Azerbaijan tidak menunjukkan langkah serius dalam bergabung dengan Eastern Partnership dan dalam krisis Ukraina, Azerbaijan memilih untuk netral dan tidak memilih pihak manapun. Hal ini dikarenakan Russia merupakan mitra dagang Azerbaijan yang sudah dari tahun 1990 dan Uni Eropa merupakan mitra dagang yang telah naik secara signifikan dari tahun 2011 dengan dengan mencapai ekspor sekitar 52%, sehingga menyebabkan Azerbaijan ingin tetap netral untuk menjaga perdangannya (Valiyev, 2016).

Terlihat bahwa keenam negara ini sebenarnya menyambut baik kebijakan *Eastern Partnership* namun karena krisis Ukraina yang merupakan respon Rusia atas EaP ini menyebabkan terjadinya perubahan haluan terhadap keenam negara yang masuk EaP. Ukraina, Moldova, dan Georgia merupakan Negara yang paling mendukung kebijakan ini melihat bahwa untuk mengakhiri implikasi krisis ukraina maka yang diperlukan adalah integrasi lebih lanjut dengan Uni Eropa dengan harapan mendapat bantuan dari UE untuk menyelesaikan permasalahan regional tersebut. Namun Belarus dan Armenia memilih untuk berpaling dengan harapan implikasi krisis ini tidak berlanjut ke negara mereka seperti yang dialami oleh Ukraina (Gotev, 2017). Yang terakhir Azerbaijan memilih untuk netral dan tidak terlalu terlibat dalam EaP dengan harapan Rusia tidak mengintervensi mereka dan juga implikasi krisis ini tidak terlalu berpengaruh ke Azerbaijan

Kesimpulan

Kebijakan EaP yang dicanangkan pada tahun 2009 adalah sebuah harapan bagi Belarus, Moldova, Ukraina, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan beserta Uni Eropa untuk berintegrasi agar menciptakan model regionalisme ekonomi di kawasan Eropa Timur khususnya daerah Balkan. Ketertarikan Uni Eropa dan negara EaP ini berlandaskan atas keuntungan ekonomi dan sumber daya alam negara EaP, bagi Eropa Timur sendiri harapan mereka berintegrasi untuk mendapatkan keuntungan perdagangan, reformasi politik, dan peningkatan ekonomi. Namun integrasi regional yang terjadi di lingkungan EaP ini mengalami masalah dalam prosesnya, pada tahun 2013 salah satu negara EaP ukraina mengalami krisis karena ketidakpuasan masyarakatnya terhadap pemerintah yang menolak perjanjian dengan Uni Eropa.

Krisis ini tidak hanya berdampak pada Ukraina saja, namun berdampak pada negara Eropa Timur lainnya, khususnya terhadap 6 negara yaitu seperti munculnya semangat separatisme setelah referendum ukraina di kawasan Eropa Timur, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik yang disebabkan adanya intervensi rusia dan dari krisis ukraina itu sendiri. Sehingga proses integrasi regional EaP ini mengalami kendala dan membuat sulitnya terwujud model regionalisme ekonomi antara Uni Eropa dan keenam negara EaP. selain itu keenam negara tersebut memiliki respon yang bebrebda-beda dalam menghadapi *Eastern Partnership* terkait krisis Ukraina. Ukraina, Moldova dan Georgia merupakan negara yang mendukung kebijakan tersebut dengan harapan impliksi krisis dapat diatasi dengan bantuan UE, namun dilain sisi Belarus dan Armenia berpaling dari EaP agar dapat menghindari implikasi tersebut karena Rusia akan mengintervensi jika ada negara yang ikut EaP. Sedangkan Azerbaijan yang tidak terlalu terpengaruh dengan krisis Ukraina dan memilih untuk netral agar tetap menjaga kestabilan ekonominya.

Dampak dari krisis Ukraina ini juga berimbas pada kebijakan EaP, karena krisis

Ukraina ini menyebabkan ketidakstabilan dan membuat integrasi EaP menjadi terhambat. Sehingga kebijakan EaP mendapatkan tantangan baik internal seperti ekonomi, konflik, dan politik maupun eksternal yang datang dari Rusia itu sendiri. Tantangan seperti tingginya tingkat korupsi, ketidakstabilan politik dan ekonomi akibat krisis, tekanan dari Rusia, dan munculnya semangat separatisme setelah referendum Krimea merupakan tantangan yang harus dihadapi kebijakan EaP untuk berintegrasi. Selain itu standar Uni Eropa yang tinggi mengenai demokrasi dan perdagangan masih belum bisa dipenuhi negara-negara EaP yang cenderung politik dan ekonominya belum stabil.

Referensi

- Walter S. Jones. Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Dan Tata Dunia. Gramedia. 1993.
- European Council. 2009. Independent International Fact-Finding Mission On The Conflict In Georgia. http://www.mpil.de/files/pdf4/iiffmCG_Volume_II1.pdf.
- Klever, Emma. Brussels. (2013). The Nagorno-Karabakh Conflict Between Armenia And Azerbaijan: An Overview Of The Current Situation. European Movement.
- Koller, Boglárka. (2013). The Fading Civic Identity of The EU Nationals: With A Special Focus On The East-Central Europeans. Budapest College Of Communication And Business.
- Lukic, Marta Radinovic. (2016). Corruption and Trade In The Western Balkans. Lund University Department of Economics.
- Mikhnovets Iryna, Moldova, Ukraine and Georgia: what has been done after the decisive Eastern Partnership Summit in Vilnius in 2013?, <https://www.aies.at/download/2015/AIES-Fokus-2015-04.pdf>, Austria Institut für Europaund Sicherheitspolitik
- Nuroglu, Elif Dan Haris Kurtagić. 2012. Costs And Benefits Of The EU Enlargement: The Impact On The EU And SEE Countries. Journal Of Economic And Social Studies. https://www.researchgate.net/profile/Elif_Nuroglu/publication/261001527_Costs_And_Benefits_Of_The_EU_Enlargement_The_Impact_On_The_EU_And_SEE_Countries/links/0c960532ff563b41eb000000/Costs-And-Benefits-Of-The-EU-Enlargement-The-Impact-On-The-EU-And-SEE-Countries.pdf.
- Network Of European Union Centre Of Excellence (EUCE). Maret 2008. Europe's Iran Diplomacy. European Union Center Of North Carolina EU Briefings. <http://Europe.unc.edu/wp-content/uploads/2013/08/Brief7-0803-Iran.pdf>.
- Ramicone, Anthony Dkk. 2014. The Ukrainian Crisis A Disputed Past And Present. Harfard IOP. http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/natsecukraine2014.pdf.
- Rojansky, Matthew. 2011. PROSPECTS FOR UNFREEZING MOLDOVA'S FROZEN CONFLICT IN TRANSNISTRIA. Washington. D.C: U.S. Commission On Security And Cooperation In Europe.
- Roaf, James. 2014. 25 Years of Transition Post-Communist Europe And The IMF. Regional Economic Issues Special Report. http://www.imf.org/external/region/bal/r/2014/25_Years_Of_Transition.pdf.
- Starr, Frederick. 2014. Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union And Its Discontents. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. Washington.
- Trenin, Dmitri. 2014. The Ukraine Crisis and The Resumption Of Great-Power Rivalry. Rusia: The Carnegie Moscow Center http://Carnegieendowment.org/files/Ukraine_Great_Power_Rivalry2014.pdf.
- Wayne Merry, E. 2015. Dealing with the Ukrainian Crisis: Transatlantic Strategy Dilemmas, Istituto Affari Internazionali, <http://www.iai.it/en/publicazioni/dealing-ukrainian->

crisis-transatlantic-strategy-dilemmas.

- Delcour, Laure. Oktober 2015. Reading Lukashenko's Belarus Without Illusions. WOJCIECH KONONCZUK. [Http://Carnegieeuro Pe.Eu/Strategiceurope/?Fa=60190](http://Carnegieeuro.Pe.Eu/Strategiceurope/?Fa=60190).
- EU Institutions. (2018). -Topics Of The European Union|. [Https://Europa.Eu/European-Union/Topics En](https://Europa.Eu/European-Union/Topics En).
- EU Institutions. (2018). -Enlargement|. [Https://Europa.Eu/European-Union/Topics/Enlargement En](https://Europa.Eu/European-Union/Topics/Enlargement En).
- European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations. (2016). -Eastern Partnership. [Https://Ec.Europa.Eu/Neighbourhood-Enlargement/Neighbourhood/Eastern-Partnership En](https://Ec.Europa.Eu/Neighbourhood-Enlargement/Neighbourhood/Eastern-Partnership En).
- Gotev Georgi, The Brief: The Eastern Partnership homecoming, <https://www.euractiv.com/section/all/news/the-brief-the-eastern-partnership-homecoming/>, diakses 23 Januari 2018.
- Grove, Thoma And Warren Strobel. (2014). Where Ukraine's Separatists Get Their Weapons. [Https://Www.Reuters.Com/Article/Us-Ukraine-Crisis-Arms-Specialreport/Special-Report-Where-Ukraines-Separatists-Get-Their-Weapons-Iduskbn0fy0ua20140729](https://www.Reuters.Com/Article/Us-Ukraine-Crisis-Arms-Specialreport/Special-Report-Where-Ukraines-Separatists-Get-Their-Weapons-Iduskbn0fy0ua20140729). Reuters Special Weapon.
- International Crisis Group. 2016. -Europe and Central Asia Report. The Eurasian Economic Union: Power. Politics And Trade. [Https://Www.Crisisgroup.Org/Europe-Central-Asia/Central-Asia/Eurasian-Economic-Union-Power-Politics-And-Trade](https://www.Crisisgroup.Org/Europe-Central-Asia/Central-Asia/Eurasian-Economic-Union-Power-Politics-And-Trade).
- Mercouris Alexander, 'Swatting Away The Fly' - At Riga Summit EU Pulls Away From Ukraine and Its Eastern Partnership, <http://russia-insider.com/en/politics/swatting-away-fly-riga-summit-eu-pulls-back-its-eastern-partnership/ri7320>,
- Mearsheimer, John J. (2014). Why The Ukraine Crisis Is The West's Fault. [Https://Www.Foreignaffairs.Com/Articles/Rusia-Fsu/2014-08-18/Why-Ukraine-Crisis-West-S-Fault](https://www.Foreignaffairs.Com/Articles/Rusia-Fsu/2014-08-18/Why-Ukraine-Crisis-West-S-Fault).
- Pasquale De Micco. 2015. -When Choosing Means Losing the Eastern Partners. The EU And The Eurasian Economic Union. [Http://Www.Europarl.Europa.Eu/Thinktank/En/Document.Html?Reference=EXPOSTUD\(2015\)549026](http://www.Europarl.Europa.Eu/Thinktank/En/Document.Html?Reference=EXPOSTUD(2015)549026).
- Ursu, Valentina. (2014). Concerned About EU Integration. Moldova's Gagauz Region Holds Disputed Referendum. [Https://Www.Rferl.Org/A/Moldova-Gagauzia-Eu-Referendum/25249087.Html](https://www.Rferl.Org/A/Moldova-Gagauzia-Eu-Referendum/25249087.Html).
- Valiyev Anar, Azerbaijan: Perspectives on Eurasian integration, http://www.ecfr.eu/article/essay_eurasian_integration_azerbaijan.